

REVITALISASIGERAKANKOHATIHMIKOMISARIATFISIPSEBAGAI PILAR CIVIL SOCIETY
DALAM MENGAWAL DEMOKRATISASI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Fadilatul Amanah^{1*}, Vera Komala², Eem Rahmawati³, Budi Wijaya⁴, Farah Nisrina Zalfa⁵

¹⁻⁵Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas
Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Indonesia

Email: fadilatulamanah998@gmail.com^{1*}, rahmawatieem7@gmail.com²,
budiwijaya6509@gmail.com³, farahnisrinazalfa36@gmail.com⁴, verakomala125@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses revitalisasi gerakan Korps HMI-Wati (Kohati) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP sebagai bagian dari pilar *civil society* dalam mengawal proses demokratisasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Sebagai organisasi perempuan dalam tubuh HMI, Kohati memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi publik, meningkatkan literasi politik perempuan, serta mengawasi jalannya pemerintahan lokal yang demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi gerakan Kohati dapat terlihat dari penguatan kapasitas kader, pembaruan metode advokasi, serta kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil di OKU. Kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya, minimnya kesadaran politik perempuan muda, serta tekanan budaya patriarkal. Namun demikian, Kohati Komisariat FISIP berhasil menghadirkan berbagai program strategis seperti sekolah demokrasi, advokasi kebijakan perempuan, serta forum diskusi publik yang memberikan kontribusi nyata bagi demokratisasi daerah.

Kata Kunci: KOHATI, HMI, Civil Society, Demokratisasi, OKU.

ABSTRACT

This study discusses the revitalization process of the HMI-Wati Corps (Kohati) movement of the Islamic Students Association of the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) as part of the civil society pillar in overseeing the democratization process in Ogan Komering Ulu Regency (OKU). As a women's organization within HMI, Kohati has a strategic role in encouraging public participation, increasing women's political literacy, and overseeing the implementation of democratic local governance.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

This study uses a qualitative approach with in-depth interviews, participatory observation, and documentation methods. The results show that the revitalization of the Kohati movement can be seen from the strengthening of cadre capacity, renewal of advocacy methods, and collaboration with various elements of civil society in OKU. The main obstacles faced include limited resources, lack of political awareness of young women, and patriarchal cultural pressures. However, Kohati, FISIP Commissariat, has succeeded in presenting various strategic programs such as democracy schools, women's policy advocacy, and public discussion forums that have made a real contribution to regional democratization.

Keywords: KOHATI, HMI, Civil Society, Democratization, OKU.

PENDAHULUAN

Proses demokratisasi di tingkat lokal merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme elektoral atau pemilihan umum semata, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik. Pada level inilah peran *civil society* menjadi signifikan, karena kelompok masyarakat sipil berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*countervailing power*) terhadap negara, sekaligus sebagai penyedia ruang edukasi politik bagi masyarakat.

Di Indonesia, organisasi kemahasiswaan memiliki peran historis yang kuat sebagai bagian dari *civil society* yang berfungsi mengontrol jalannya pemerintahan serta menyuarakan kepentingan rakyat. Salah satu unsur penting dalam HMI adalah Korps HMI-Wati (Kohati), sebuah lembaga semi-otonom yang mengkonsentrasikan perhatiannya pada isu-isu perempuan, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kohati tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengembangan kapasitas kader perempuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong terciptanya ruang kesetaraan, partisipasi politik perempuan, serta penguatan nilai-nilai demokrasi. Hal ini membuat Kohati menjadi komponen penting dalam pembentukan karakter *civil society* yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di tengah berkembangnya kompleksitas tantangan demokrasi lokal, Kohati HMI Komisariat FISIP di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menghadapi situasi yang menuntut revitalisasi gerakan agar tetap relevan dan efektif. Kabupaten OKU sebagai daerah dengan karakter sosial yang beragam sedang berada dalam fase perkembangan demokrasi lokal yang membutuhkan partisipasi masyarakat maupun kelompok pemuda secara luas. Dalam konteks ini, peran perempuan sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi sangat krusial, terutama mengingat masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Kondisi sosial budaya di OKU yang masih cenderung patriarkal menjadikan peran perempuan—termasuk mahasiswa perempuan—dalam ruang publik cenderung terbatas. Minimnya literasi politik perempuan muda, rendahnya partisipasi mereka dalam forum kebijakan, serta kurangnya ruang bagi perempuan untuk mengartikulasikan aspirasi publik menjadi hambatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, revitalisasi gerakan kohati menjadi

kebutuhan mendesak agar dapat melakukan transformasi gerakan dari sekadar organisasi formalitas menjadi organisasi yang aktif melakukan advokasi, riset, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Revitalisasi gerakan Kohati HMI Komisariat FISIP bukan hanya persoalan internal organisasi, tetapi juga respons terhadap tantangan sosial-politik yang semakin kompleks. Dalam era digital, misinformasi, rendahnya kesadaran politik, dan apatisme generasi muda menjadi faktor yang berpotensi melemahkan struktur demokrasi lokal. Kohati perlu mengambil peran strategis dalam menguatkan kembali nilai-nilai kritis di kalangan mahasiswa, terutama perempuan, dan memastikan bahwa suara mereka turut mewarnai proses demokratisasi di OKU.

Selain itu, perkembangan demokrasi lokal yang dinamis di OKU seperti isu transparansi kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, persoalan kesejahteraan masyarakat, dan isu kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kehadiran kelompok masyarakat sipil yang aktif mengawasi, mengawal, dan mengadvokasi kepentingan publik. Kohati sebagai organisasi kader perempuan memiliki potensi besar untuk memainkan peran tersebut melalui kegiatan kaderisasi, advokasi kebijakan, pendidikan publik, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga masyarakat sipil lainnya.

Pada akhirnya, revitalisasi gerakan Kohati merupakan bentuk aktualisasi dari nilai dasar perjuangan HMI, yaitu menciptakan insan akademis, pencipta, pengabdian yang berkeadilan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT. Dengan memperkuat kapasitas kader, memperluas jejaring advokasi, serta meningkatkan sensitivitas gender dan demokrasi, kohati dapat bertransformasi menjadi pilar penting *civil society* yang mampu berkontribusi nyata bagi penguatan demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses revitalisasi gerakan Kohati HMI Komisariat FISIP sebagai pilar *civil society* dalam mengawal demokratisasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Pendekatan ini dipilih karena isu gerakan sosial, demokrasi, dan pemberdayaan perempuan merupakan fenomena yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, tetapi membutuhkan pemahaman kompleks mengenai makna, pengalaman, dinamika sosial, serta interaksi antaraktor didalamnya. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali perspektif aktor-aktor yang terlibat secara mendalam dan memperoleh gambaran yang lebih kaya tentang realitas sosial yang sedang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara sistematis dan mendalam berdasarkan data empiris di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk: Menggambarkan bentuk revitalisasi gerakan kohati secara rinci, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, memahami kontribusi kohati dalam konteks demokratisasi lokal, mendeskripsikan dinamika internal organisasi serta interaksi dengan lingkungan eksternal. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya berfokus pada: HMI Komisariat FISIP di lingkungan perguruan tinggi terkait, Lokasi ini dipilih karena Kohati Komisariat FISIP merupakan objek utama penelitian, dan kabupaten OKU merupakan wilayah tempat organisasi tersebut beroperasi dan berinteraksi dengan proses demokratisasi daerah.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu Data Primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi dan Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur. Data penelitian dikumpulkan melalui tiga cara utama yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi.

HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kohati HMI Komisariat FISIP Kabupaten OKU

Kohati HMI Komisariat FISIP merupakan lembaga semi otonom HMI yang memiliki fungsi khusus dalam pengembangan kader perempuan. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), kohati memiliki peran strategis karena menjadi salah satu organisasi perempuan muda yang paling aktif dalam isu pemberdayaan perempuan dan pendidikan politik. Kohati FISIP OKU terdiri dari struktur inti seperti Ketua Kohati, Sekretaris, Bendahara, serta beberapa bidang seperti Bidang Pengembangan Perempuan, Bidang Kajian dan Advokasi, serta Bidang Media.

Sebagian besar anggota kohati merupakan mahasiswa perempuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja yang memiliki minat tinggi terhadap demokrasi, kebijakan publik, dan isu gender. Lingkungan akademik yang mendukung membuat Kohati memiliki ruang bergerak yang luas dalam mendorong kemajuan perempuan di daerah.

Dalam wawancara dengan Ketua Kohati, ia menyatakan:

“Kohati itu bukan hanya organisasi pengkaderan, tetapi juga wadah pengabdian bagi perempuan muda. Kami ingin Kohati tampil sebagai organisasi perempuan yang berpengaruh dalam Pembangunan demokrasi di OKU.

(Wawancara dengan Ketua Kohati, 2025)

Bentuk Revitalisasi Gerakan Kohati dalam Mengawal Demokratisasi Revitalisasi gerakan Kohati dapat dilihat dari tiga ranah utama: penguatan kapasitas kader, perluasan model gerakan, dan digitalisasi.

Penguatan Kapasitas Kader Perempuan Kohati mengembangkan beberapa program strategis untuk meningkatkan kualitas kader, seperti:

Sekolah Demokrasi Perempuan Program ini mengajarkan literasi politik, teknik advokasi, analisis kebijakan publik, dan komunikasi politik. Program ini menjadi landasan penting dalam membentuk kader yang siap menjadi aktor civil society. Pelatihan Advokasi dan Literasi

Gender Kader dilatih untuk memahami kesetaraan gender, isu kekerasan perempuan, dan hak-hak perempuan. Workshop Penelitian Sosial Kader dilatih membuat riset mini yang menjadi dasar advokasi organisasi.

Salah satu kader Kohati mengatakan: “Kami diajarkan bukan hanya menjadi anggota organisasi, tetapi menjadi perempuan yang berani bersuara dan tahu bagaimana memengaruhi kebijakan. (Wawancara dengan Ketua Kohati, 2025).

Model Gerakan Advokatif dan Substantif

Revitalisasi juga terlihat dari pergeseran pola gerakan. Jika sebelumnya kegiatan hanya bersifat seremonial (perayaan hari besar, seminar singkat), kini Kohati bergerak lebih substantif:

1. Keterlibatan aktif dalam audiensi kebijakan dengan pemerintah.
2. Pengawasan isu publik seperti kekerasan perempuan.
3. Pengawasan program-program pemerintah yang menyangkut perempuan.

Digitalisasi Gerakan

Era digital menuntut organisasi untuk hadir di ruang media sosial. Kohati mengembangkan gerakan digital melalui: Infografis literasi demokrasi, Kampanye anti-hoax politik Konten edukasi perempuan muda, Kajian digital melalui Zoom.

Kader Bidang Media mengatakan: “Perempuan muda sekarang banyak di media sosial. Edukasi lebih efektif jika dikemas digital. Karena itu kami aktif membuat konten kampanye sosial.” (Wawancara dengan Ketua Kohati, 2025) Digitalisasi menjadi kunci penting dalam transformasi gerakan civil society di era baru.

Faktor Pendukung Revitalisasi Gerakan Kohati

Terdapat beberapa faktor yang mendorong revitalisasi gerakan: Dukungan Lingkungan Akademik FISIP memberikan ruang diskusi demokrasi yang kuat. Idealisme Kader Perempuan.

Kader memiliki motivasi tinggi untuk mempengaruhi perubahan sosial. Jejaring dengan LSM dan Pemerintah Jejaring ini memperkuat legitimasi gerakan Kohati. Momentum Politik Lokal Situasi demokrasi OKU yang dinamis mendorong Kohati terlibat aktif. Semangat Kader Perempuan yang Tinggi, Kader Kohati memiliki idealisme kuat untuk menciptakan perubahan sosial, dukungan dari alumni dan pengurus HMI.

Alumni memberikan bimbingan, materi pelatihan, dan jejaring eksternal, kebutuhan sosial masyarakat tingginya kasus kekerasan perempuan, minimnya partisipasi perempuan dalam politik, dan kurangnya literasi publik menciptakan kebutuhan akan gerakan kohati.

Faktor Penghambat

Minimnya Literasi Politik Perempuan Muda Perempuan muda di OKU banyak yang apatis terhadap isu politik, demokrasi, atau kebijakan publik. Budaya patriarkal yang masih kuat beberapa informan menyampaikan bahwa perempuan masih dianggap kurang pantas aktif dalam ruang politik atau ruang publik.

Keterbatasan Dana Organisasi Kohati sering terkendala pendanaan untuk pelaksanaan program advokasi. Kesibukan akademik kader, kader sulit membagi waktu antara tugas kuliah, kegiatan organisasi, dan keluarga. Akses geografis wilayah OKU yang luas membuat program pemberdayaan perempuan didesa-desa tertentu sulit, dijangkau, budaya patriarkal di OKU perempuan sering dianggap tidak pantas bicara politik, apatisisme politik di kalangan remaja banyak remaja perempuan di OKU tidak peduli urusan politik, kesibukan akademik kader, kader kesulitan membagi waktu antara akademik dan organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait revitalisasi gerakan Kohati HMI Komisariat FISIP di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan perannya sebagai pilar civil society dalam mengawal demokratisasi.

Pertama, revitalisasi gerakan kohati ditandai dengan perubahan paradigma internal organisasi. Kohati tidak lagi hanya berfokus pada kegiatan seremonial atau pengkaderan formal semata, melainkan telah mengembangkan gerakan berbasis pengetahuan, advokasi, dan pemberdayaan perempuan. Pergeseran ini terlihat dari peningkatan kapasitas kader melalui program-program seperti Sekolah Demokrasi Perempuan, pelatihan advokasi, workshop riset sosial, serta keterlibatan kader dalam audiensi kebijakan publik. Kader Kohati dibekali kemampuan analisis sosial, kesadaran kritis, dan keterampilan advokasi yang menjadi modal utama dalam mengawal demokrasi lokal di OKU. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi gerakan

tidak sekadar kosmetik organisasi, tetapi merupakan transformasi substansial yang berdampak pada kualitas kader dan efektivitas gerakan.

Kedua, Kohati berhasil mengembangkan model gerakan advokatif dan substantif yang menjangkau masyarakat luas, terutama perempuan muda dan remaja. Program-program Kohati, seperti kampanye anti kekerasan perempuan dan anak, pemantauan Pilkada, forum dialog kebijakan, serta literasi pemilih pemula, menunjukkan peran Kohati sebagai aktor civil society yang aktif mengawasi jalannya demokrasi dan mendorong partisipasi publik. Aktivitas ini mencerminkan bahwa Kohati tidak hanya hadir sebagai organisasi internal kampus, tetapi juga menjadi aktor sosial yang mampu menjembatani antara masyarakat, pemerintah, dan publik dalam isu-isu demokrasi dan kesetaraan gender.

Ketiga, Kohati memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan gerakan dan edukasi politik. Aktivitas media sosial, produksi konten edukatif, kampanye anti-hoax, dan live forum diskusi daring merupakan strategi adaptif dalam menghadapi era informasi. Digitalisasi gerakan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, tetapi juga menarik perhatian generasi muda, memperkuat citra organisasi, serta menjadikan Kohati lebih relevan dalam konteks demokrasi modern.

Keempat, meski revitalisasi gerakan telah menunjukkan keberhasilan, terdapat tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Budaya patriarkal di Kabupaten OKU masih membatasi partisipasi perempuan dalam ranah publik dan politik. Keterbatasan dana organisasi, kesibukan akademik kader, serta apatisisme politik di kalangan masyarakat muda menjadi faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam pengembangan gerakan ke depan. Meski demikian, Kohati berhasil meminimalkan dampak hambatan tersebut melalui inovasi program, kolaborasi dengan pemerintah dan LSM, serta penguatan jaringan civil society.

Kelima, dari perspektif teori civil society, Kohati memenuhi fungsi utama civil society seperti yang diungkapkan oleh Cohen & Arato, Habermas, dan Putnam. Kohati bersifat otonom dari negara dan pasar, menciptakan ruang publik yang deliberatif, serta membangun *social capital* melalui jejaring internal dan eksternal. Kohati mampu menggabungkan dimensi edukatif, advokatif, dan dialogis dalam satu gerakan, sehingga perannya dalam mengawal demokratisasi di OKU menjadi nyata dan terukur.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi Kohati HMI Komisariat FISIP telah menjadikan organisasi ini sebagai pilar civil society yang signifikan dalam mendorong demokrasi lokal, memperkuat partisipasi perempuan, dan membangun kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Keberhasilan ini menjadi contoh konkret bagaimana organisasi mahasiswa perempuan dapat menjadi agen perubahan sosial dan politik di tingkat lokal.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diberikan, baik untuk Kohati HMI Komisariat FISIP, pemerintah daerah, maupun pihak terkait lainnya.

1. Saran untuk Kohati HMI Komisariat FISIP Penguatan Kapasitas Kader Kohati disarankan untuk terus mengembangkan kapasitas kader melalui pendidikan politik, pelatihan advokasi berbasis riset, dan pengembangan soft skill seperti public speaking, kepemimpinan, serta manajemen organisasi. Perlu ada program berkelanjutan yang menjamin kader tidak hanya terlibat dalam kegiatan temporer, tetapi memiliki kemampuan jangka panjang dalam

berkontribusi terhadap demokrasi lokal. Diversifikasi Pendanaan dan Kemitraan Agar kegiatan berjalan lebih maksimal, Kohati perlu mengembangkan strategi pendanaan berkelanjutan, termasuk kerjasama dengan LSM, donor lokal maupun nasional, serta institusi akademik. Pendanaan yang stabil memungkinkan Kohati menjalankan program-program advokasi, pendidikan, dan kampanye sosial dengan lebih profesional dan luas. Peningkatan Aktivitas Digital dan Literasi Media Digitalisasi gerakan telah terbukti efektif, sehingga Kohati perlu mengembangkan konten kreatif, interaktif, dan berbasis data. Selain itu, literasi media bagi kader perlu ditingkatkan untuk memastikan pesan edukatif sampai dengan tepat sasaran dan mampu mempengaruhi opini publik. Pendekatan Partisipatif dan Inklusif Kohati disarankan meningkatkan inklusivitas dalam pengambilan keputusan internal, melibatkan anggota baru dari berbagai latar belakang, serta membangun forum diskusi lintas generasi dan lintas komunitas. Hal ini akan memperkuat legitimasi dan keberlanjutan gerakan.

2. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten OKU

Dukungan Kebijakan terhadap Organisasi Perempuan Pemerintah daerah sebaiknya memberikan ruang dan dukungan bagi organisasi perempuan seperti Kohati, baik melalui pendanaan, fasilitasi program, maupun kolaborasi dalam pengambilan kebijakan publik. Dukungan ini akan memperkuat partisipasi perempuan dalam demokrasi lokal.

Kolaborasi dalam Program Pendidikan Politik Pemerintah dapat bekerja sama dengan Kohati untuk menyelenggarakan program pendidikan politik bagi masyarakat, terutama perempuan dan pemilih pemula, sehingga proses demokratisasi semakin inklusif.

3. Saran untuk Pihak Lain dan Akademisi Penelitian Lanjutan Para peneliti disarankan melakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas program Kohati, evaluasi dampak terhadap partisipasi politik perempuan, serta strategi organisasi mahasiswa perempuan dalam konteks civil society yang lebih luas. Penelitian longitudinal akan memberikan data yang lebih valid untuk pengembangan gerakan. Penguatan Jaringan Civil Society LSM, media, dan organisasi kepemudaan lainnya di OKU dapat menjalin kolaborasi strategis dengan kohati, sehingga penguatan civil society di daerah dapat lebih terintegrasi dan berdampak terhadap demokrasi lokal.

4. Saran Umum untuk Masyarakat Kesadaran Politik dan Gender Masyarakat, terutama perempuan dengan generasi muda, disarankan untuk aktif mengikuti program-program pendidikan politik, advokasi, dan diskusi publik yang diselenggarakan oleh Kohati atau organisasi civil society lainnya. Partisipasi aktif masyarakat akan meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan Kohati HMI Komisariat FISIP dapat semakin memperkuat posisinya sebagai pilar civil society yang efektif, berkelanjutan, dan berpengaruh dalam mengawal demokratisasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta menjadi model gerakan perempuan muda yang kritis, progresif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Habermas, J. (1989). *Transformasi Struktural Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: Keruntuhan dan Kebangkitan Komunitas Amerika*. New York: Simon & Schuster.

- Ohen, J., & Arato, A. (1992). Masyarakat Sipil dan Teori Politik. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hadiwinata, BS(2016).Masyarakat Sipil: Pembangun dan Sekaligus Perusak Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Illy,C. (2004).Gerakan Sosial,1768-2004. Boulder, CO:Paradigm Publishers.
- Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role of Civil Society Organizations in Promoting Social and Political Changein Indonesia.*Journal of Ethnicand Cultural Studies*, 11(3), 187-206.
- Utra, BK, & Hijri, YS (2022). Partisipasi Negara dan Masyarakat Sipil dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(24), 235-247.
- Wing Artha, G. (2025). Discourse on the Political Role of Civil Society in Building Democracyin Indonesia from the Perspective of Intellectualsin East Java. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 9(1), 143-159.
- Jovani, A. (2025). Building an Inclusive Democracy: Enhancing Women's and Youth Political Participation in Indonesia. *Sociae Polites*, 26(1).
- Hadiwinata,BS(2016). Masyarakat Sipil sebagai Kekuatan Demokratisasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik(JSP),21(3),1-18.